

**PROGRAM INKLUSI SOSIAL SEBAGAI TRANSFORMASI LAYANAN
PERPUSTAKAAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MAKALAH TUGAS AKHIR

**untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan**



**GHAYATUL QURBI
NIM 19026044/2019**

**PROGRAM STUDI INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MAKALAH TUGAS AKHIR

Judul : Program Inklusi Sosial Sebagai Transformasi
Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Nama : Ghayatul Qurbi

NIM : 19026044

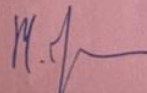
Program Studi : Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

Departemen : Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Fakultas : Bahasa dan Seni

Padang, Februari 2024

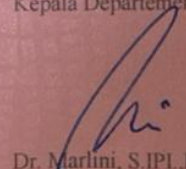
Disetujui oleh Pembimbing,



Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.

NIP. 198307112009122006

Kepala Departemen



Dr. Marlina, S.IPI, MLIS.

NIP. 198102012009122005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Ghayatul Qurbi

NIM : 19026044

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan makalah di depan Tim Penguji
Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang
dengan judul


**Program Inklusi Sosial sebagai Transformasi Layanan Perpustakaan
di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**

Padang, Januari 2024

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.

1. 

2. Sekretaris : Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom.

2. 

3. Anggota : Jeihan Nabila, S.IIP., M.I.Kom.

3. 



Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir merupakan makalah dengan judul “Program Inklusi Sosial sebagai Transformasi Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat” ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni berupa gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan dari pembimbing dan penguji.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia diberi sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Padang, Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Ghayatul Qurbi
NIM: 19026044

ABSTRAK

Ghayatul Qurbi, 2024. “Program Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat”. *Makalah*. Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk mendeskripsikan: (1) proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang lebih memperhatikan kebutuhan informasi pengguna dan dampaknya di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat; (2) transformasi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjadi fasilitator untuk kebutuhan informasi yang relevan bagi pengembangan potensi diri; (3) transformasi perpustakaan melalui perkembangan teknologi informasi melalui kemajuan TIK; (4) pustakawan dalam menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan untuk merubah paradigma perpustakaan.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil dari pembahasan pada makalah tugas akhir ini sebagai berikut: (1) proses pendekatan berbasis kebutuhan pengguna dimulai dengan pustakawan secara aktif berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami minat dan kebutuhan informasi mereka. Survei dan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi topik yang diminati dan jenis informasi apa yang paling dibutuhkan. Angket dan kuisisioner yang disebar luaskan terdapat pada link google form yang disebar oleh Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat; (2) pondok baca digital, penggunaan OPAC, pengembalian buku menggunakan sistem digital dan penggunaan sumber daya digital seperti infocus, audio dan laptop sebagai sarana pendukung pada pelatihan di perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pembelajaran dengan menggunakan sumber daya digital; (3) transformasi perpustakaan melalui perkembangan teknologi informasi melalui iSumbar Mambaco merupakan aplikasi yang dapat mendukung akses digital ke koleksi buku-buku yang tersedia di perpustakaan Provinsi Sumatera Barat; (4) Pustakawan sebagai agen informasi dalam menjembatani masyarakat dengan melakukan program edukasi dan literasi informasi dengan adanya kunjungan studi dari sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Kunjungan studi ini siswa siswi diajak berwisata literasi dan mengenal lebih dekat perpustakaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Program Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat”.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada bapak dan ibu: (1) Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum., selaku dosen pembimbing makalah tugas akhir dan penasehat akademik; (2) Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen penguji I makalah tugas akhir dan Jeihan Nabila, S.IIP., M.I.Kom selaku dosen penguji II makalah tugas akhir; (3) Yelvi Oktavia, S.IP, Rozi, S.IP, Rudi Yasman, A.Md dan Silvi, A.Md selaku informan data penulisan tugas akhir; (4) Dr. Marlini, S.IPI.,MLIS selaku Kepala Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pustakawan dan pembaca.

Padang, 15 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Perpustakaan Umum	7
2. Layanan Perpustakaan.....	9
3. Inklusi Sosial.....	12
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penulisan	24
2. Objek Kajian.....	25
3. Pengumpulan Data	25
4. Sistematika Penulisan	26
BAB II PEMBAHASAN	27
A. Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka dan Dampaknya dalam Menjadikan Perpustakaan Sebagai Wahana Rujukan Informasi yang Relevan.....	27
B. Perpustakaan Menjadi Fasilitator untuk Kebutuhan Informasi yang Relevan bagi Pengembangan Potensi Diri	37
C. Transformasi Perpustakaan Melalui Perkembangan Teknologi Informasi Melalui Kemajuan TIK.....	43
D. Pustakawan Sebagai Agen Informasi dalam Menjembatani Masyarakat dengan Informasi yang Dibutuhkan.....	50
BAB III PENUTUP.....	57

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar Judul Seleksi Buku (Bahasa).....	29
Gambar 2. Kuisisioner Google Form Pendataan Informasi Kebutuhan Pengguna	32
Gambar 3. Contoh Penerbit Lokal Sumatera Barat.....	33
Gambar 4. Kunjungan Studi Literasi oleh Sekolah.....	34
Gambar 5. Kelas Kecantikan Membentuk Alis.....	37
Gambar 6. Pondok Baca Digital	39
Gambar 7. OPAC	39
Gambar 8. Penggunaan Sumber Daya Digital	39
Gambar 9. Tim Sinergi Provinsi melakukan Sosialisasi.....	41
Gambar 10. Aplikasi iSumbar Mambaco.....	45
Gambar 11. Layanan Pencarian di iSumbar Mambaco.....	47
Gambar 12. OPAC	47
Gambar 13. Pelatihan Bahasa Jepang	51
Gambar 14. Contoh Kuisisioner Kebutuhan Pengunjung Perpustakaan	52
Gambar 15. Edukasi dan Literasi	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memajukan ilmu pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk upaya pemerintah ialah melalui perpustakaan. Sesuai dengan kemajuan perpustakaan di era disrupsi 4.0 perpustakaan mempunyai peran sebagai agen perubahan yang mana akhirnya masyarakat menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang cerdas dan masyarakat yang ilmiah. Dengan kata lain masyarakat yang cerdas pembelajar (*learning society*). Selain itu diharapkan perpustakaan dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang netral untuk semua kalangan juga berperan sebagai pembentuk kepribadian masyarakat yang mandiri dan kreatif (Andini, 2019:22). Inklusi sosial mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan layanan publik, termasuk layanan perpustakaan. Sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab menyediakan layanan informasi dan pengetahuan, perpustakaan harus berperan aktif dalam mendorong inklusi sosial.

Seperti yang kita ketahui belakangan ini pada tahun 2018 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melaksanakan suatu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dimana perpustakaan umum digerakkan untuk

bertransformasi sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia (Perpustakaan Nasional RI, 2020). Setelah adanya program berbasis inklusi sosial perpustakaan bertransformasi sebagai perpustakaan yang bisa memajukan beragam jenis layanan yang sesuai dengan keperluan masyarakat selaku sasaran pelayanan perpustakaan. Diantara berbagai jenis perpustakaan yang melaksanakan program berbasis inklusi sosial yakni perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melayani semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial.

Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pola transformasi perpustakaan umum yang awalnya sekedar wadah sumber informasi atau gedung buku, kini perpustakaan Dinas Provinsi Sumatera Barat melaksanakan transformasi layanan dengan menyediakan dan memudahkan masyarakat di perpustakaan dalam bentuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seperti adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, sarana dan prasarana lebih canggih yang disediakan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dalam mengakses buku-buku yang ada pada perpustakaan serta pustakawan yang aktif melakukan interaksi

dengan pengguna pustaka yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan daya guna perpustakaan yang tepat sasaran sehingga memenuhi memajukan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Kasi Promosi dan Layanan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut masih belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu: *Pertama*, belum optimalnya layanan berbasis inklusi sosial yang dapat dilihat dari kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pihak perpustakaan tentang kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk merancang layanan yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada diluar kelompok yang terbiasa menggunakan perpustakaan. Sebagai akibatnya, program-program layanan inklusi sosial yang dilakukan oleh perpustakaan sering kali mengalami kurangnya partisipasi dari masyarakat. Meskipun pada awalnya masyarakat aktif dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan, tetapi hal ini sering kali tidak berlangsung lama dan mereka kemudian kehilangan minat dalam mengikuti program dan layanan yang ditawarkan seperti pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yaitu membuat menggunakan bahan organik dan pengelolaan sampah rumah tangga menjadi bahan nilai guna. Dalam proses pengadaan koleksi bahan pustaka, perpustakaan masih kurang memperhatikan kebutuhan pengguna. Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam menyediakan buku

yang dibutuhkan oleh pengguna pustaka sehingga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Belum optimalnya ketersediaan buku yang ada pada perpustakaan Provinsis Sumatera Barat dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah untuk lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari pihak perpustakaan tentang kebutuhan masyarakat yang beragam serta merancang layanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terus terlibat dalam kegiatan perpustakaan dan memanfaatkan layanan yang disediakan dengan optimal.

Kedua, kurangnya sosialisasi atau promosi kegiatan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat dimana masih banyaknya masyarakat yang belum tahu mengenai layanan berbasis inklusi di perpustakaan ini. Pustakawan sebelumnya hanya memanfaatkan media sosial seperti *instagram* dan *facebook* untuk menyebarkan informasi mengenai pelatihan yang disediakan oleh perpustakaan, jadwal pelatihan serta seminar yang diadakan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, kegiatan wisata literasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta literasi siswa-siswi sekolah itu sendiri dan mengandalkan pengunjung yang datang secara langsung sebagai sarana promosi.

Oleh karena itu, upaya-upaya yang lebih proaktif dan terstruktur perlu dilakukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan inklusi sosial di perpustakaan kepada masyarakat secara luas.

Menurut hasil pendapat masyarakat yang penulis temukan di lapangan saat melakukan wawancara dengan narasumber, perpustakaan perlu meningkatkan promosi kepada kalangan-kalangan remaja yang aktif menggunakan media sosial seperti Tiktok, Twitter dan Youtube sehingga menjangkau audiens yang lebih luas di segala umur. Dengan aktifnya perpustakaan dalam melakukan kegiatan promosi di media sosial diharapkan dapat meningkatkan pengguna perpustakaan dan perpustakaan juga harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang pengguna pustaka butuhkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Program Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat”** agar dapat memberikan masukan yang berguna untuk pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif dan berdaya saing dimasa depan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penulisan makalah untuk mendeskripsikan : (1) bagaimana proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang lebih memperhatikan kebutuhan informasi pengguna dan dampaknya dalam menjadikan perpustakaan sebagai wahana rujukan informasi

yang relevan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat?; (2) bagaimana perpustakaan menjadi fasilitator untuk kebutuhan informasi yang relevan bagi pengembangan potensi diri?; (3) bagaimana transformasi perpustakaan melalui perkembangan teknologi informasi melalui kemajuan TIK?; (4) bagaimana pustakawan dalam menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan untuk merubah paradigma perpustakaan yang pasif menjadi perpustakaan yang aktif?.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan makalah untuk mendeskripsikan: (1) untuk mengetahui proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang lebih memperhatikan kebutuhan informasi pengguna dan dampaknya dalam menjadikan perpustakaan sebagai wahana rujukan informasi yang relevan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat; (2) untuk mengetahui tDinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan transformasi pada perpustakaan menjadi fasilitator untuk kebutuhan informasi yang relevan bagi pengembangan potensi diri; (3) untuk mengetahui transformasi perpustakaan melalui perkembangan teknologi informasi melalui kemajuan TIK; (4) untuk mengetahui pustakawan dalam menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan untuk merubah paradigma perpustakaan yang pasif menjadi perpustakaan yang aktif.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah: (1) bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang inklusi sosial sebagai transformasi layanan; (2) untuk Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai perbaikan dan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam layanan berbasis inklusi sosial, dan memberikan masukan dalam rangka menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis inklusi sosial; (3) bagi Universitas Negeri Padang yaitu untuk menambah koleksi bahan pustaka dan pedoman bagi mahasiswa UNP pada umumnya dan mahasiswa program studi informasi, perpustakaan dan kearsipan khususnya dalam pencarian informasi mengenai layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks kajian ini akan membahas mengenai 3 aspek yang relevan: (1) perpustakaan umum; (2) layanan perpustakaan; (3) inklusi sosial.

1. Perpustakaan Umum

Perpustakaan sangatlah penting karena menyediakan akses dan sumber daya, mendukung literasi dan pendidikan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan memainkan peran penting mendasar dalam masyarakat dengan menjadi pintu gerbang pengetahuan dan budaya.

Menurut Aziz (2014:21) perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan melayani umum atau semua

anggota lapisan masyarakat yang memerlukan jasa perpustakaan dan informasi. Perpustakaan umum mempunyai akses yang paling besar dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini karena disebabkan antara lain karena perpustakaan umum berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat dan ditujukan bagi masyarakat umum (Sukaesih & Winoto, 2019:6).

Menurut Sutarno (2006:15) perpustakaan umum adalah satu jenis perpustakaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) letaknya berada ditengah-tengah masyarakat atau pemukiman penduduk; (2) proses pengelolaannya biasanya adalah lembaga dalam pemerintah daerah setempat atau masyarakat setempat (swakelola); (3) koleksi bahan pustaka meliputi berbagai jenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani; (4) sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan daerah (APBD); (5) pemakai atau pengguna perpustakaan umum adalah semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali; (6) oleh karena perpustakaan umum pada dasarnya milik masyarakat dan merupakan layanan umum yang sangat penting. Maka pemakainya oleh masyarakat biasanya tidak dipungut biaya.

Menurut Sulisty-Basuki (dalam Sukaesih & Winoto, 2019:7) menjelaskan yang termasuk jenis perpustakaan umum adalah Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, Perpustakaan Umum Tingkat Kotamadya/Kabupaten, Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan, Perpustakaan Tingkat Desa, Perpustakaan Keliling dan perpustakaan khusus/lembaga.

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali yang mana perpustakaan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat luas.

2. Layanan Perpustakaan

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam sebuah perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemakai atau pengguna. Tolak ukur dari keberhasilan sebuah perpustakaan yaitu proses layanan perpustakaan. Layanan yang dikatakan baik adalah layanan yang bisa memenuhi kebutuhan pemakainya.

a. Pengertian Layanan Perpustakaan

Menurut Rahmah (2018:2) layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis yang pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraanya. Melalui pelayanan masyarakat dapat merasakan kesan secara langsung, bagaimana mereka diperlakukan, didukung dan dilayani (Andini, 2019:37).

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Bab V Pasal 14 mendefinisikan layanan perpustakaan adalah;

“Layanan yang dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan dan juga setiap perpustakaan mengembangkam layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka”.

Menurut Sen (2023:19) layanan perpustakaan adalah sumber daya, fasilitas dan wadah yang membantu pengguna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Layanan perpustakaan berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, perpustakaan harus menyampaikan bahan pustaka secara akurat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Layanan perpustakaan adalah gambaran perpustakaan, jika tidak ada layanan, maka tidak ada perpustakaan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan adalah layanan yang menyediakan semua bentuk bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

b. Jenis Layanan

Menurut Rahmah (2018:7-12) jenis layanan perpustakaan yakni: (1) layanan peminjaman bahan pustaka (layanan sirkulasi), yaitu layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka; (2) layanan referensi, yaitu layanan yang diberikan oleh perpustakaan untuk koleksi-koleksi khusus seperti kamus, ensiklopedia,

almanak, direktori, buku tahunan yang berisi informasi teknis dan singkat; (3) layanan ruang baca, yaitu layanan yang diberikan perpustakaan berupa tempat untuk melakukan kegiatan membaca diperpustakaan; (4) layanan audiovisual yaitu, layanan perpustakaan khusus untuk bahan audiovisual; (5) layanan bercerita, layanan ini untuk perpustakaan anak-anak atau perpustakaan sekolah dasar; (6) layanan jasa dokumentasi, yaitu jasa layanan berupa penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pengunjung seperti terbitan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan oleh perpustakaan; (7) layanan penelusuran literatur yang mana layanan ini biasanya diselenggarakan oleh perpustakaan lembaga penelitian dan perpustakaan perguruan tinggi; (8) layanan penyebaran informasi baru yakni, suatu layanan yang memungkinkan pemustaka mengikuti perkembangan informasi terbaru yang dibutuhkan sesuai bidang ilmu yang diminati pemustaka; (9) layanan terjemahan dimaksudkan untuk membantu pemustaka dalam membaca bahan pustaka yang berbahasa asing diperpustakaan; (10) layanan jasa silang layan; (11) layanan penyebaran informasi terseleksi yang mana penyelenggaraan layanan ini tidaklah mudah, karena pustakawan menyeleksi daftar artikel harus mengetahui subjek atau bidang ilmu yang diseleksi; (12) layanan pembundelan dan perbaikan buku, melayani reproduksi bahan pustaka berbentuk buku, surat kabar dan majalah, melalui fotogrami, dan fotokopi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Inklusi Sosial

a. Pengertian Inklusi Sosial

Istilah inklusi sosial pada kajian ilmu perpustakaan bisa dikatakan masih baru. Munculnya konsep inklusi sosial ini dari istilah eksklusi sosial yaitu keadaan dimana situasi masyarakat yang sadar bahwa dirinya memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Menurut Simarmata (2017:9) pengertian inklusi sosial adalah suatu proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh ataupun sebagian.

Menurut Jauhari (2017:1) inklusi sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua konsep penting yang menjadi sorotan dalam berbagai diskusi mengenai pembangunan sosial. Inklusi sosial mengacu pada kondisi dimana setiap individu dalam masyarakat merasa diterima, dihormati dan terlibat dalam kegiatan sosial, budaya dan ekonomi.

Menurut Ra'is (2017:92) inklusi sosial merupakan upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Inklusi sosial merangkul semua warga masyarakat yang mengalami stigma dan marjinalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, inklusi sosial sebagai upaya untuk mendorong masyarakat membangun relasi sosial dan solidaritas, sehingga bisa membuka akses dan penerimaan kepada semua warga

negara tanpa pengecualian dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Sehingga inklusi sosial memberikan pemahaman untuk tidak saling mengucilkan dan dikucilkan serta mulai menerima adanya perbedaan sebagai sebuah Hak Asasi.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial adalah suatu proses pendekatan yang mana melibatkan masyarakat dalam membentuk hubungan sosial yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik dan ideal.

b. Inklusi Sosial Perpustakaan

Menurut Kurniasih (2021:150) perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk berkarya.

Menurut Haryanti (2019:117) perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang proaktif membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri serta membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar perpustakaan.

Menurut Diana (dalam Tania, 2023:3) perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah perubahan pada perpustakaan dengan tujuan menguatkan literasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang

berdaya saing serta teknologi yang tepat guna dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat di masa teknologi digital saat ini.

Dari pengertian oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inklusi sosial perpustakaan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat untuk itu perpustakaan mesti dirancang supaya mempunyai banyak nilai kemanfaatan untuk masyarakat.

c. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan Nasional melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mana program tersebut sudah berjalan dari tahun 2018 dengan dukungan dari Bappenas RI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transformasi berarti perubahan bisa berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.

Menurut Endang (2023:2) transformasi perpustakaan memiliki arti sebuah proses dimana unsur perpustakaan berubah ke arah yang lebih baik seperti: (1) transformasi dari budaya baca semula menjadi budaya baca dan tulis; (2) transformasi dari perpustakaan sumber daya fisik menjadi perpustakaan berbasis pengetahuan; (3) transformasi dari orientasi penyediaan koleksi fisik ke elektronik; (4) transformasi perpustakaan yang mandiri menjadi kolaborasi membangun; (5) transformasi pada bahan koleksi yang ada di awalnya menggunakan kertas menjadi tidak menggunakan kertas; (6) transformasi

terhadap pandangan ahli kepustakawanan menjadi sebuah studi ilmu disipliner yang dari berbagai ilmu.

Menurut Utami dan Prasetyo (2019:33) transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai berikut: *Pertama*, koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informan. Menurut teori *User Experience* (UX) yang membahas mengenai bagaimana meningkatkan pengalaman pemustaka dalam mengakses dan menggunakan koleksi perpustakaan dengan memperhatikan kemudahan, kegunaan dan kepuasan pemustaka. Perpustakaan perlu menerapkan prinsip-prinsip UX dalam mendesain layanan dan akses koleksinya. Prinsip UX antara lain kebergunaan, kegunaan, kepuasan dan aksesibilitas. Dengan menerapkan prinsip UX, perpustakaan akan mengetahui kebutuhan informasi pengguna melalui studi pemustaka. Kemudian hasil studi tersebut dijadikan dasar dalam mengembangkan koleksi, sehingga koleksi yang diadakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka (Tagge, 2014:23-54). Berdasarkan teori tersebut, koleksi perpustakaan menjadi lebih dimanfaatkan karena sesuai dengan kebutuhan dan mudah diakses oleh pemustaka. Koleksi tidak lagi menjadi barang mati, namun menjadi wahana rujukan informasi yang membantu

pemustaka menemukan solusi atas permasalahan mereka.yang membahas mengenai bagaimana meningkatkan pengalaman pemustaka dalam mengakses dan menggunakan koleksi perpustakaan dengan memperhatikan kemudahan, kegunaan dan kepuasan pemustaka.

Menurut teori yang dikemukakan Murnahayati (2018:57-62) pengadaan koleksi adalah proses menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Koleksi yang diadakan oleh suatu perpustakaan hendaknya relevan dengan minat dan kebutuhan, lengkap dan terbitan mutakhir, agar tidak mengecewakan masyarakat yang dilayani. Koleksi merupakan unsur pokok dalam setiap perpustakaan, karena pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak didukung oleh adanya koleksi yang memadai. Untuk dapat memberikan pelayanan informasi secara maksimal maka perpustakaan harus berusaha untuk menyediakan berbagai sumber informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pengguna. Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, koleksi hendaknya disesuaikan dan dikembangkan dengan kebutuhan penggunanya yang berubah dari tuntutan pemakainya pada masa sekarang serta masa yang akan datang sehingga mutu perpustakaan tetap ada dan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Bahan pustaka yang dihimpun akan dijadikan koleksi perpustakaan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna. Secara umum sistem pengadaan bahan pustaka di lingkungan perpustakaan dilakukan melalui; pembelian, hadiah atau sumbangan, tukar menukar, titipan, dan penerbitan sendiri.

Kedua, perpustakaan yang awalnya cuma sekedar tempat penyimpanan buku-buku dalam rak sekarang bertransformasi menjadi fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan informasi yang relevan. Menurut Lotts (2018:77-149) bahwa perpustakaan dapat berperan sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi dengan cara: (1) menyediakan akses ke informasi bisnis dan pasar yang relevan bagi wirausahawan dan pelaku bisnis lokal; (2) menyediakan ruang belajar dan fasilitas bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan produktivitas; (3) bermitra dengan instansi pemerintahan dan organisasi bisnis untuk mengembangkan inisiatif pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas; (4) melakukan digitalisasi koleksi dan warisan budaya lokal yang dapat mendukung pariwisata dan pengembangan UMKM. Berdasarkan pendapat Megan Lotts tersebut, dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi yang relevan bagi pengembangan bisnis dan ekonomi lokal, perpustakaan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah maupun komunitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Malik (2013:1245-1248) Perpustakaan juga memiliki peran pada bidang ekonomi, seperti yang dijelaskan bahwa perpustakaan umum memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat karena menyediakan informasi tentang barang dan jasa. Ini juga mendistribusikan buku dan film di dalam negara. Perpustakaan umum pada tingkat ini memberikan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi

masyarakat modern. Perpustakaan umum juga dapat mengembangkan kemampuan ekonomi lokal dengan menyediakan informasi yang diperlukan mengenai proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, kegiatan masyarakat, fasilitas pinjaman, skema bantuan negara. Oleh karena itu perpustakaan umum memiliki peran dalam pengembangan ekonomi suatu bangsa.

Ketiga, perpustakaan tidak lagi menjadi ruang baca yang sepi oleh pemustaka sekarang perpustakaan bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri (*makerspace*). Menurut Wymer (2012:63-85) berdasarkan teori perpustakaan sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan perlu bertransformasi menjadi pusat pembelajaran masyarakat dengan cara: (1) menyediakan koleksi dan program yang mendorong minat baca dan membangun keterampilan baru bagi segala usia; (2) bekerjasama dengan organisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat; (3) menyediakan kelas dan fasilitas belajar untuk mendukung pendidikan seumur hidup masyarakat; (4) melakukan kegiatan *outreach* ke komunitas untuk mempromosikan layanan pembelajaran perpustakaan; (5) menggunakan teknologi digital untuk mendukung akses sumber belajar. Berdasarkan pendapat Wymer tersebut, dengan berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat, perpustakaan dapat membantu warga mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan potensi diri secara berkelanjutan sepanjang hayat.

Menurut Retno (2015:2-4) adanya pembentukan perpustakaan di tiap-tiap daerah, diharapkan dapat memperbaiki dapat mengatasi ketertinggalan yang dialami masyarakat. Dengan meningkatkan taraf kecerdasan masyarakat maka perbaikan mutu kehidupan pun dapat dijamin. Dengan demikian pemberdayaan masyarakatpun dapat terlaksana. Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan minat terhadap buku atau bacaan. Minat baca yang tinggi menjadikan seseorang dapat memperoleh informasi dari bacaan yang dibacanya dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna memperbaiki kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) dengan cara membuat mereka berdaya, memiliki semangat bekerja untuk memerangi kekurangan dan keterbelakangan masyarakat dengan harapan membangun diri mereka sendiri untuk lebih maju dan sejahtera.

Saat ini kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, semakin menuntut kebutuhan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Dalam menyikapi perkembangan tersebut dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang dapat dimulai dari tingkatan sosial yang paling kecil. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dimulai dari pendidikan. Pendekatan melalui pendidikan ini pada praktiknya di masyarakat banyak mengambil peran untuk pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya pendidikan masyarakat memiliki

prioritas pada individu yang kurang beruntung dari segi ekonomi, geografis dan sosial budaya. Artinya sasaran pendidikan masyarakat adalah mereka yang kurang beruntung karena belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan potensi diri yang dimiliki. Perkembangan pembangunan yang kurang merata disetiap wilayah Indonesia, mengakibatkan kurang tersebarnya pula akses informasi bagi golongan masyarakat menengah ke bawah.

Keempat, perpustakaan bertransformasi dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui kemajuan TIK. Menurut Chowdhury (2002:89-166) teori transformasi perpustakaan ke dalam bentuk digital dengan koleksi, layanan dan operasional yang serba digital berbasis TIK. Transformasi perpustakaan ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan TIK meliputi beberapa aspek utama: (1) koleksi digital perpustakaan mengumpulkan dan menyimpan koleksi dalam format digital, seperti *e-book*, *e-journal*, *database online*, multimedia digital dan lainnya. Koleksi diakses secara online oleh pemustaka melalui jaringan komputer; (2) layanan digital seperti katalog online, pencarian informasi, referensi virtual, literasi informasi, dan layanan pemustaka lainnya diselenggarakan secara digital dengan bantuan teknologi jaringan komputer dan internet; (3) otomasi perpustakaan terintegrasi digunakan untuk mengelola semua kegiatan perpustakaan secara digital, seperti sirkulasi, katalog, akuisisi, inventarisasi dan lainnya; (4) ruang digital

perpustakaan beralih fungsi sebagai ruang interaksi sosial dan pusat kegiatan pembelajaran berbasis digital.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Siswandi (2009:66-69) perlu beberapa hal yang masih terus mendapat perhatian agar proses transformasi perpustakaan dapat berjalan dengan baik yaitu: (1) prosedur operasional standard, ini sangat sesuai diterapkan di perpustakaan karena pekerjaan perpustakaan merupakan pekerjaan yang selalu berulang dan dapat dikerjakan oleh pustakawan yang bekerja secara tetap maupun sementara. Oleh karena itu SOP menjadi bagian penting dalam proses transformasi perpustakaan. (2) sumber daya manusia pustakawan dan infrastruktur jaringan, transformasi perpustakaan membutuhkan pustakawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya. (3) sistem perpustakaan yang terintegrasi, sebagaimana diketahui alur kerja perpustakaan dimulai dari pengadaan, pengelolaan, sampai dengan layanan sirkulasi mulai dari keanggotaan, peminjaman, pengembalian serta pemesanan. Disisi lain, pemustaka sebagai pengguna sistem mendapat manfaat dengan mengetahui adanya wakil dokumen dalam bentuk entri cantuman yang muncul di OPAC atau WebOPAC melalui internet. Satu sistem yang terintegrasi sebenarnya dapat dikembangkan oleh perpustakaan atau dengan cara membeli paket-paket sistem perpustakaan yang sudah tersedia di pasaran. (4) digitalisasi koleksi, dengan cara digitalisasi jenis koleksi khusus seperti artikel jurnal, makalah, prosiding dan lain-lain menjadi kekayaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat pemustaka lebih luas. Bisa jadi tidak semua jenis koleksi yang sudah digital dapat dibuka untuk

umum, tapi setidaknya informasi tertentu sudah dapat diketahui ketersediaannya di perpustakaan tersebut. Dan bagi pemustaka yang membutuhkan dapat menghubungi pustakawan yang bekerja di perpustakaan tersebut. (5) *information literacy* sebagai kemampuan dalam membutuhkan informasi apa yang dibutuhkan, menemukan informasi, mengetahui bagaimana mengevaluasi informasi serta mengerti bagaimana menggunakan informasi secara etis. Salah satu contoh pembentukan budaya akses adalah dalam hal kunjungan perpustakaan.

Kelima, merubah paradigma perpustakaan yang pasif menjadi perpustakaan aktif yang berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan Beagle (2012:23-98) teori perpustakaan sebagai *Knowledge and Information Commons*, information commons adalah ruang bersama di perpustakaan yang dirancang untuk kegiatan berbagi, menemukan, membuat, dan menyebarkan informasi oleh komunitas pemustakanya. *Knowledge commons* adalah ruang pengetahuan bersama yang dibentuk perpustakaan untuk kegiatan perpustakaan untuk kegiatan berbagi pengetahuan, berkolaborasi, berdiskusi, hingga menghasilkan pengetahuan dan inovasi baru oleh komunitasnya. Berdasarkan pendapat Beagle tersebut, dengan perpustakaan bertransformasi dari penyedia informasi pasif menjadi agen informasi dan pengetahuan yang aktif menciptakan, membentuk, dan berbagi informasi bersama komunitas pemustakanya. Teori ini

menggambarkan peran perpustakaan sebagai agen informasi dan pengetahuan yang partisipatif dan kolaboratif di era digital saat ini.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Junaeti dan Arwani (2016:29-38) perpustakaan merupakan pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan. Perpustakaan memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Oleh karenanya, pelayanan yang memuaskan pemakai memegang peranan penting agar perpustakaan dapat eksis, perwujudan pelayanan adalah adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat, memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu atau sindiran yang mengarah kepada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas maupun kesejahteraan, mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang tertib dan tidak pandang bulu, pelayanan yang jujur dan terus terang. Perilaku pemustaka dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang dan jasa. Perilaku pemustaka adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perolehan (*acquisition*); mencari (*searching*) dan membeli (*purchasing*); tahap konsumsi (*consumption*); menggunakan (*using*) dan mengevaluasi (*evaluating*), tahap tindakan pasca beli (*disposition*); apa yang dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi adalah dimana perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca buku saja tetapi menjadi pusat ilmu pengetahuan sebagai inovasi dan pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti adanya kelas menjahit, kelas memasak, kelas membaca dan mendongeng, kelas bahasa inggris dan kelas bahasa jepang, acara seminar dan juga turut serta dalam mengembangkan perekonomian masyarakat mencakup usaha mikro dan makro, kebudayaan daerah, sosial dan teknologi yang terdapat pada wilayah tersebut sehingga dapat membantu memajukan potensi-potensi yang ada di daerah itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan tugas akhir inklusi sosial sebagai transformasi layanan perpustakaan ini penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian pada status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode penulisan ini adalah untuk menjelaskan pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan deskriptif mengenai pengalaman, pandangan dan persepsi subjek penelitian.

2. Objek Kajian

Objek kajian dalam penulisan makalah tugas akhir ini adalah Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan makalah tugas akhir ini yaitu:

a. Wawancara

Menurut Subagyo (2011:39) wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan mendapatkan suatu informasi serta langsung dengan melakukan tanya jawab dalam pertanyaan – pertanyaan pada responden yang dilakukan secara lisan dan bertatap mungka. Narasumber dalam wawancara yaitu Ibu Yelvi Oktavia selaku Kasi Promosi dan Layanan, Bapak Rudi Yasman selaku Kasi Otomasi Perpustakaan, Ibu Rozi selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan dan Ibu Silvi selaku Bidang Layanan Perpustakaan.

b. Studi Pustaka

Menurut Hermawan (2019:18) studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau yang sedang diteliti.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat di dalam penulisan makalah tugas akhir ini sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan koleksi bahan pustaka, antara lain; pendekatan berbasis kebutuhan pengguna, penetapan kriteria seleksi koleksi, pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan dengan penelitian dan penulis lokal, program edukasi dan literasi informasi.
- b. Pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi, antara lain; perubahan fokus menjadi pusat informasi ekonomi, koleksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan khusus untuk pelaku usaha dan pengusaha.
- c. Pusat kegiatan masyarakat, antara lain; fasilitator pembelajaran dan pendidikan, koleksi bahan pustaka yang diversifikasi dan pusat keterampilan dan pelatihan.
- d. Pengembangan teknologi informasi melalui TIK, antara lain: sistem manajemen perpustakaan berbasis TIK, akses digital ke koleksi dan layanan pencarian canggih.
- e. Perpustakaan sebagai agen informasi, antara lain: fasilitator kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan informasi masyarakat, program edukasi dan literasi informasi, monitoring dan evaluasi program.